
Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia Belanda Tahun 1869-1942

Iyus Jayusman^{a, 1} Miftahul Habib Fachruruzi^{b, 2 *}

^a ^bProgram Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

¹ iyus.jayusman@unsil.ac.id; ² miftahul.habib@unsil.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peranan orang Tionghoa dalam dunia pers di Hindia Belanda sebelum abad kedua puluh, (2) mengetahui perkembangan industri pers Tionghoa di Hindia Belanda pada masa pergerakan nasional. Artikel ini disusun dengan berdasarkan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo melalui tahapan pemulihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers di Hindia Belanda dimulai dengan kemunculan Lo Tun Tay sebagai editor surat kabar *Mataharie* pada tahun 1869. Krisis ekonomi yang terjadi menjelang akhir abad kesembilan belas mendorong munculnya embrio industri pers Tionghoa yang ditandai dengan akuisisi sejumlah pers Eropa oleh pengusaha Tionghoa. Pers Tionghoa semakin berkembang memasuki masa pergerakan nasional. Pers Tionghoa memiliki perbedaan orientasi politik yakni mendukung Nasionalisme Indonesia, mendukung Nasionalisme Tionghoa, dan mendukung pemerintah kolonial. Adapun sikap tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, eksistensi pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional tidak hanya dapat ditinjau dari aspek politik saja, melainkan pula aspek ekonomi. Industri pers Tionghoa di Hindia Belanda berakhir seiring dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942.

Kata Kunci : Pers, Kaum Tionghoa, Hindia Belanda

Abstract

This article aims to: (1) find out the role of the Chinese in the press in the Dutch East Indies before the twentieth century, (2) find out the development of the Chinese press industry in the Dutch East Indies during the national movement era. This article was compiled based on the historical research method according to Kuntowijoyo through the stages of topic selection, heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The existence of the Chinese in the press in the Dutch East Indies began with the emergence of Lo Tun Tay as editor of the newspaper Mataharie in 1869. The economic crisis that occurred towards the end of the nineteenth century prompted the emergence of an embryonic Chinese press industry which was marked by the acquisition of a number of European press by the Chinese businessman. The Chinese press is increasingly entering the period of the national movement. The Chinese press has different political orientations, among others supporting Indonesian Nationalism, supporting Chinese Nationalism, and supporting the colonial government. This orientation cannot be separated from political and economic interests. Thus, the existence of

the Chinese press during the national movement could not only be viewed from the political aspect, but also from the economic aspect. The Chinese press industry in the Dutch East Indies ended with the Japanese occupation in 1942.

Keywords: *Press, Chinese, Netherlands East-Indies*

PENDAHULUAN

Keberadaan pers pada masa kolonial memiliki kedudukan yang sangat vital sebagai media menyuarakan aspirasi politik terhadap rezim kolonialisme Belanda. Perkembangan pers pada kenyataannya seringkali mengalami hambatan melalui berbagai regulasi yang diciptakan pihak penguasa. Salah satu aturan yang cukup mengekang para jurnalis di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Pers atau yang dikenal dengan nama *Drukpersreglement* tahun 1856 (Maters, 2003). Namun aturan tersebut tidak serta merta menghambat perkembangan pers di Hindia Belanda. Pada kenyataannya, pers tetap bertahan dengan menggelorakan semangat nasionalisme. Secara historis hal ini dapat dibuktikan, di mana keberadaan pers di Indonesia tetap eksis dengan menampilkan peran orang Indo-Eropa, orang Tionghoa dan segelintir orang pribumi. Selain muatan politik, pers juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi. Pers dianggap sebagai salah satu bidang yang dapat mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, perkembangan pers di Hindia Belanda dapat dilihat dari aspek politik dan ekonomi.

Kaum Tionghoa pada umumnya dipersepsikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan bisnis dan memiliki modal industri yang jauh lebih memadai dibandingkan dengan kaum bumiputra kebanyakan (Wakhid, 1999). Hal tersebut memungkinkan mereka mempunyai banyak kesempatan, juga peluang untuk bergelut dalam industri pers. Kendatipun berperan besar dalam industri pers, sikap kaum Tionghoa terhadap pergerakan nasional tidak dapat disamakan sepenuhnya. Meskipun demikian, kepemilikan mereka terhadap modal dan perusahaan-perusahaan percetakan telah memungkinkan semua diskursus nasionalisme termasuk pers dapat terus diartikulasikan. Namun tidaklah terlampau salah kalau dikatakan, sebetulnya ada pula segelintir orang Tionghoa yang kurang memiliki modal, mereka lebih aktif terjun diranah politik praktis berintegrasi dengan para pejuang bumiputra. Hanya saja di sini realitas historis perlu diungkapkan bahwa kelompok minoritas secara historis mereka memiliki peran dalam berbagai periode sejarah di Hindia Belanda termasuk juga dalam bidang pers.

Artikel ini berusaha membahas eksistensi orang-orang Tionghoa dalam dunia pers di Hindia Belanda pada masa kolonial. Kajian sejarah pers di Indonesia telah cukup banyak dilakukan di Indonesia, namun kebanyakan hanya mengkaji pers bumiputra dan belum ada yang membahas eksistensi kaum Tionghoa dalam periode yang cukup panjang. Kajian yang dilakukan oleh Fachruruzi (2019) misalnya, lebih berfokus pada pengaruh politik etis terhadap perkembangan pers bumiputra dan hanya sedikit menyinggung tentang eksistensi kaum Tionghoa di bidang pers. Sementara itu, artikel yang ditulis oleh Kosasih (2013) telah banyak mengulas eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers Hindia Belanda, namun lebih banyak mengulas perannya di era pergerakan nasional (1900-1942) dan

belum banyak menyinggung keterlibatan awal kaum Tionghoa khususnya sebelum memasuki abad kedua puluh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers Hindia Belanda, sejak awal keterlibatannya hingga runtuhnya rezim pemerintah kolonial.

METODE PENELITIAN

Fokus utama penulisan artikel ini adalah mengkaji eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers di Hindia Belanda sejak awal kemunculan redaktur Tionghoa di Hindia Belanda hingga berkembangnya industri pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional. Sumber untuk bahan penulisan ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Padjadjaran, Universitas Siliwangi, literatur koleksi pribadi, serta jurnal ilmiah yang diterbitkan secara daring. Waktu penelitian yang penulis persiapkan sekitar 6 bulan yaitu sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2021. Adapun artikel ini disusun dengan berdasarkan metode penelitian sejarah dengan melalui tahapan pemulihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Orang Tionghoa dan Pers Sebelum Abad Kedua Puluh

Kemunculan pers di Hindia Belanda telah berlangsung sejak abad kedelapan belas tepatnya pada tahun 1744. Pada tahun itu, muncul sebuah surat kabar bernama *Bataviasche Nouvelles* di Batavia (Fachruruzi, Wardo, & Mulyoto, 2017). Meskipun surat kabar itu tidak bertahan lama, namun kehadirannya menjadi titik awal sejarah pers di Hindia Belanda. Sejak saat itu, berbagai surat kabar mulai bermunculan. Namun demikian, pada umumnya surat kabar tersebut dikelola oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Tionghoa sama sekali belum terlibat dalam dunia pers pada periode ini. Praktis sejak awal kemunculannya hingga pertengahan abad kesembilan belas orang-orang Eropa mendominasi dunia pers Hindia Belanda. Situasi ini bertahan hingga kurang lebih satu abad lamanya sejak kemunculan surat kabar pertama di Hindia Belanda.

Eksistensi awal kaum Tionghoa dalam dunia pers dapat dilacak menjelang akhir abad kesembilan belas. Seorang jurnalis bernama Lo Tun Tay menjadi orang Tionghoa pertama, khususnya dari kalangan peranakan yang terlibat dalam dunia pers. Pada tahun 1869, Lo Tun Tay bergabung dalam surat kabar *Mataharie* dan menjabat sebagai editor surat kabar tersebut (Adam, 2003). Kehadiran Lo Tun Tay sebagai editor surat kabar *Mataharie* menjadi titik awal eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers Hindia Belanda. Meskipun demikian, kemunculan Lo Tun Tay rupanya tidak serta merta membuat orang-orang Tionghoa tertarik untuk terlibat dalam dunia pers. Butuh waktu bertahun-tahun hingga banyak orang Tionghoa mulai tertarik dan melirik dunia pers sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Para pengusaha Tionghoa juga belum memiliki ketertarikan untuk memiliki sebuah surat kabar sendiri.

Kesadaran orang Tionghoa untuk bergelut dalam dunia pers mulai mengalami muncul pada dekade akhir abad kesembilan belas. Ada sejumlah alasan yang mendorong pergeseran paradigma

tersebut. Sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial maupun orang Belanda pada umumnya terhadap orang Tionghoa mendorong munculnya kesadaran politik. Selain itu, diberlakukannya pajak penghasilan bagi kaum Tionghoa pada tahun 1879 memicu munculnya kegelisahan sosial. Berbagai situasi tersebut membuat kaum Tionghoa mulai berfikir untuk meyalurkan aspirasi sosial-politiknya. Alhasil, dunia pers mulai dilirik oleh kaum Tionghoa untuk menyampaikan aspirasinya. Sejak saat itu, mulai banyak orang Tionghoa mengirimkan artikelnya ke berbagai surat kabar yang ada pada masa itu.

Penurunan harga komoditas gula dan kopi di pasaran dunia memicu krisis finansial pada tahun 1880-an di Hindia Belanda. Krisis ini rupanya berdampak pada sektor-sektor lain termasuk dunia pers. Pada masa itu, banyak pengusaha perkebunan dari Belanda juga memiliki usaha di bidang pers. Oleh karena perusahaan penerbitan bukan dianggap sebagai aset strategis, maka para pengusaha Belanda tersebut mulai menjualnya kepada pengusaha Tionghoa. *Bintang Timoor* menjadi salah satu surat kabar yang diakuisisi oleh orang Tionghoa karena alasan ini. *Bintang Timoor* sebenarnya merupakan salah satu surat kabar terbesar di Hindia Belanda pada masa itu, namun terpaksa dijual oleh perusahaan pemiliknya yakni *Gebroeders Gimber & Co.* Perusahaan itu mengalami kesulitan finansial sehingga terpaksa menjual *Bintang Timoor*. Seorang pengusaha Tionghoa yang memiliki nama samaran Baba Tjoa Tjoan Lok mengakuisisi *Bintang Timoor* dengan nilai 124.600 gulden pada tahun 1886 (Adam, 2003: 111).

Setelah diambil alih oleh Baba Tjoa Tjoan Lok, isi *Bintang Timoor* kemudian banyak memuat kepentingan kaum Tionghoa. Pada masa itu, muncul sebuah perkumpulan Tionghoa peranakan Hokkian bernama *Hok Kian Kong Tik Soe*. *Hok Kian Kong Tik Soe* memiliki tujuan untuk melestarikan adat-istiadat Tionghoa agar tidak dilupakan oleh para peranakan di Hindia Belanda (Kosasih, 2013). Semula organisasi yang didirikan pada 1864 tersebut menggunakan pers milik orang Eropa untuk mempromosikan agenda serta kegiatannya. Sejak *Bintang Timoor* dimiliki oleh pengusaha Tionghoa, maka promosi agenda *Hok Kian Kong Tik Soe* dialihkan pada surat kabar itu. Simbiosis mutualisme antara *Hok Kian Kong Tik Soe* dan *Bintang Timoor* ini membuka kesadaran sosial-budaya baru bagi kaum Tionghoa di Hindia Belanda.

Akuisisi *Bintang Timoor* oleh Baba Tjoa Tjoan Lok rupanya juga diikuti oleh pengusaha Tionghoa lainnya. Pengusaha Tionghoa lain bernama Lie Kim Hok juga mengakuisisi surat kabar yang semula dimiliki kalangan misionaris bernama *Bintang Djohar*. Surat kabar ini sendiri terbit di Bogor sejak tahun 1885. Satu tahun berselang, Lie Kim Hok juga mengakuisisi surat kabar *Pembrita Betawi* yang diterbitkan di Batavia. Surat kabar lain yang dimiliki oleh kaum Tionghoa pada penghujung abad kesembilan belas antara lain *Bintang Soerabaia* (Surabaya, tahun 1887), *Tamboor Melayoe* (Semarang), *Sinar Terang* (Batavia, tahun 1888), *Bintang Barat* (Betawi), *Pertja Barat* (Padang, tahun 1894), *Tjahaja Sumatra* (Padang, tahun 1898) dan sebagainya (Adam, 2003: 118-122).

Pada akhir abad kesembilan belas, nampak jelas jika eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers tidak hanya sebatas di dalam dewan redaksi sebuah surat kabar semata. Eksistensi kaum Tionghoa

dalam dunia pers juga terlihat lewat meningkatnya angka kepemilikan pers oleh para pengusaha Tionghoa. Kemunculan perkumpulan-perkumpulan miliki kaum Tionghoa seperti *Hok Kian Kong Tik Soe* juga turut mendorong perkembangan pers Tionghoa di masa ini. Akhir abad kesembilan belas dapat dikatakan sebagai titik awal berkembang industri pers yang dimiliki oleh kaum Tionghoa di Hindia Belanda. Situasi ini kemudian terus berkembang pada abad kedua puluh seiring dengan diberlakukannya politik etis dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia.

B. Industri Pers Tionghoa Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia

Barangkali tidaklah terlampau berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan industri pers Tionghoa pada periode pergerakan nasional Indonesia-sejak awal abad kedua puluh hingga tahun 1942, tidak terlepas dari konteks historis Hindia Belanda secara keseluruhan. Sulit dipungkiri pers yang diprakarsai oleh orang Tionghoa, khususnya Tionghoa peranakan merupakan bagian dari dinamika perkembangan sejarah pers nasional. Pada masa pergerakan nasional, keberadaan industri pers atau jurnalistik di Hindia Belanda khususnya di pulau Jawa setidaknya dikelola oleh tiga kelompok penerbit, yaitu pers yang dikelola oleh orang Belanda, Tionghoa, dan bumiputra. Memperhatikan maraknya industri pers ketika itu pada dasarnya berpengaruh besar terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sedang berjuang mempertahankan kekuasaannya. Terguncangnya kekuasaan pemerintah kolonial, salah satunya disebabkan oleh maraknya surat kabar yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Munculnya kesadaran tersebut secara embrional akan menjadi landasan kuat lahirnya nasionalisme dikalangan kaum pribumi. Industri pers Tionghoa, secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses serta dinamika tersebut.

Memasuki abad kedua puluh, pertumbuhan pers Tionghoa semakin menjamur. Pers Tionghoa tersebut, secara penggunaan bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu surat kabar (pers) berbahasa Melayu yang pasca tahun 1928 disebut sebagai bahasa Indonesia dan pers berbahasa Tionghoa (Wakhid, 1999). Pers Tionghoa berbahasa Melayu atau Indoneis umumnya dikelola oleh orang-orang Tionghoa peranakan, sementara pers Tionghoa berbahasa Tionghoa dikelola oleh orang-orang Tionghoa totok. Oleh karena kedua surat kabar tersebut lahir dalam situasi dan kondisi kolonialisme di Hindia Belanda, maka keduanya tidak bisa dipisahkan dari dinamika historisitas pers serta perkembangan sosial politik di Hindia Belanda yang begitu kompleks pada awal masa pergerakan nasional.

Industri pers Tionghoa, khususnya Tionghoa peranakan pada awal abad kedua puluh ditandai dengan kemunculan surat kabar *Li Po*. Surat kabar ini diterbitkan di Sukabumi, Jawa Barat (Kosasih, 2013). Penerbitan *Li Po* tidak dapat dilepaskan dari organisasi baru milik orang Tionghoa bernama *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK). THHK merupakan organisasi Pan-Tionghoa pertama yang didirikan tahun 1900 di Batavia. THHK pada dasarnya berupaya merangkul seluruh orang Tionghoa tidak hanya di Batavia atau pulau Jawa, tetapi dari seluruh wilayah Hindia Belanda (Sai, 2016: 375). Selain itu, organisasi ini juga memiliki tujuan untuk memajukan kaum Tionghoa di Hindia Belanda, khususnya dalam bidang budaya dan pendidikan (Fachrurozi, 2019). *Li Po* dengan demikian digunakan oleh

THHK untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan maupun misinya dalam memajukan kaum Tionghoa.

Penerbitan *Li Po* kemudian diikuti oleh penerbitan surat kabar lainnya, seperti surat kabar *Pewartar Soerabaia*, terbit di Surabaya tahun 1902, *Warna Warta*, terbit di Semarang tahun 1902, *Chabar Perniagaan*, terbit di Jakarta tahun 1903, *Djawa Tengah*, terbit di Semarang tahun 1909, dan *Sin Po*, terbit di Jakarta tahun 1910 (Amalia & Artono, 2017). Redaktur dari beberapa surat kabar Tionghoa Peranakan menggunakan jasa orang Belanda. Alasan penggunaan orang Belanda sebagai redaktur pers Tionghoa dikarenakan mereka memiliki status sosial yang tinggi sehingga dianggap memiliki kekebalan terhadap polisi kolonial maupun ancaman delik pers. Situasi ini berubah sejak tahun 1907 saat orang Tionghoa secara sosial disetarakan dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Tionghoa mulai mengisi kursi redaktur dalam pers Tionghoa. Selain itu, jurnalis bumiputra juga mulai mendapat kesempatan untuk bekerja di berbagai surat kabar milik orang Tionghoa tersebut.

Belasan tahun kemudian pasca munculnya surat kabar generasi pertama lahir pula surat kabar *Bing Seng* di Batavia tahun 1922. Selain *Bing Seng*, muncul pula sejumlah surat kabar seperti *Keng Po* di Jakarta tahun 1923, *Sin Jit Po* di Surabaya tahun 1924, *Soeara Publiek* di Surabaya tahun 1925, hingga *Sin Bin* di Bandung tahun 1925. Memperhatikan banyak lahirnya surat kabar seperti tertulis di atas, tahun 1920-an dapat dianggap sebagai dekade sangat penting dalam sejarah pers Tionghoa peranakan yang lebih kental menyuarakan wacana-wacana politik. Wacana politik berbagai pers Tionghoa tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga orientasi politik yakni: *pertama*, pers Tionghoa dengan orientasi nasionalis Tiongkok yang diwakili oleh *Sin Po*; *kedua*, pers Tionghoa dengan orientasi mendukung pergerakan nasional Indonesia yang diwakili oleh *Sin Tit Po*; dan *ketiga*, pers Tionghoa yang menjadi bagian kelompok *Chung Hwa Hui* dan mendukung pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diwakili oleh *Siang Po* (Kosasih, 2013; Surjomihardjo, 1980; Wakhid, 1999). Perbedaan tersebut menjadi bagian dari perkembangan industri pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional.

Dari tiga Pers Tionghoa peranakan tersebut, *Sin Tit Po* menjadi yang paling dominan dalam mendukung ide serta gagasan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia. *Sin Tit Po* merupakan surat kabar penerus *Sin Jit Po* yang mengalami kebangkrutan (Kosasih, 2013). *Sin Tit Po* dapat dikatakan sebagai surat kabar yang tampil sebagai wakil pers Tionghoa yang menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. *Sin Tit Po* juga menjadi organ tidak resmi dari Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dalam berkontribusi mendukung perjuangan pergerakan nasional Indonesia (Surjomihardjo, 1980). *Sin Tit Po* menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh dari golongan Arab sehingga menunjukkan sifat inklusif dari surat kabar ini. Sikap *Sin Tit Po* yang mendukung pergerakan nasional maupun nasionalisme Indonesia ini mengaskan peranan kaum Tionghoa dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Sedikit berbeda dengan *Sin Tit Po*, surat kabar *Sin Po* yang dalam pemberitaan mengenai pergerakan nasional Indonesia lebih memilih netral. Namun kendatipun demikian bukan berarti *Sin Po* mengabaikan perjuangan nasional Indonesia, mereka tetap menjalin hubungan baik dengan elit

pergerakan bahkan tidaklah berlebihan kalau dikatakan mereka sangat bersimpati dengan pergerakan nasional Indonesia. Perlu pula ditambahkan jika orientasi nasionalisme Tionghoa yang dianut *Sin Po* menginspirasi tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Bahkan *Sin Po* juga pernah menggunakan tenaga jurnalis bumiputra. Salah satu jurnalis bumiputra yang pernah bekerja di *Sin Po* adalah Wage Rudlof Supratman, penulis lagu kebangsaan Indonesia Raya (Wakhid, 1999). Selain *Sin Po*, surat kabar lain yang juga memiliki orientasi Nasionalisme Tionghoa adalah *Pewartar Soerabaia* (Amalia & Artono, 2017). Surat kabar ini dikenal vokal dalam mengkritik pemerintah kolonial untuk memperjuangkan kepentingan kaum Tionghoa.

Sementara itu, surat kabar *Siang Po* dan *Pelita Tionghoa* cenderung mendukung pemerintah kolonial. Keberpihakan kedua surat kabar ini kepada pemerintah kolonial Belanda lebih terkait dengan kepentingan kepada kepentingan ekonomi atau bisnis semata (Wakhid, 1999). Singkatnya, strategi tersebut dilakukan oleh *Siang Po* dan *Pelita Tionghoa* hanya untuk keselamatan bisnisnya belaka. Hal tersebut dapat dipahami mengingat ancaman delik pers dan bahkan pembredelan surat kabar senantiasa mengancam pers yang kritis terhadap pemerintah kolonial (Maters, 2003). Meskipun demikian, baik *Siang Po* ataupun *Pelita Tionghoa* juga tidak memusuhi kaum pergerakan. Sikap “mendua” ini menegaskan jika orientasi bisnis kedua surat kabar tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan orientasi politiknya.

Seiring dengan tumbuhnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia, terbitan surat kabar Tionghoa Peranakan pun secara kuantitatif bertambah secara signifikan pada dekade tahun 1930-an. Pertumbuhan ini sangat dimungkinkan guna menyuarakan gerakan anti Jepang yang sedang berperang untuk mewujudkan cita-cita dari konsep politik Asia Timur Raya. Lebih tepatnya, tumbuh suburnya pers Tionghoa Peranakan sebagai dampak anti Jepang. Salah satu contoh sikap anti Jepang tersebut dapat dilihat dalam *Sin Tit Po*. Surat kabar ini memuat kritik Liem Koen Hian terhadap sikap Soetomo yang memuji kemajuan Jepang namun mengabaikan agresivitas negara tersebut dalam menginvasi negara tetangga khususnya Tiongkok (Suryadinata, 1971). Industri surat kabar Tionghoa Peranakan yang lahir tahun 1930-an diantaranya *Nansing* di Semarang tahun 1930, *Kiao Seng* di Jakarta tahun 1931, *Kong Hoa Po* di Jakarta tahun 1934, *Mata Hari* di Semarang tahun 1934, *Soeara Semarang* di Semarang tahun 1936, *Kung Yen* di Jakarta tahun 1936, *Pelita Tionghoa* di Jakarta 1936, *Djit Po* di Semarang tahun 1936, dan *Hong Po* di Jakarta tahun 1939. Surat kabar Tionghoa Peranakan yang lahir didekade 1930-an isinya lebih kental menyuarakan perasaan anti-Jepang. Sebagai dampaknya, ketika Jepang berhasil menduduki tanah Jawa, semua pers Tionghoa dihentikan penerbitannya dan para pemimpin redaksinya ditangkap lalu dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi (Kosasih, 2013). Invasi Jepang pada tahun 1942 dengan kata lain dapat dianggap sebagai akhir dari industri pers Tionghoa di Hindia Belanda.

Pers Tionghoa sebagai salah satu unsur yang dikelola oleh Tionghoa peranakan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap aktivitas perjuangan bangsa Indonesia. Para pelaku industri pers Tionghoa terpanggil untuk ikut mensosialisasikan ide serta gagasan para pejuang pergerakan bangsa

Indonesia dan mereka memandang bahwa ide pergerakan nasional yang muncul saat itu sebagai antitesa terhadap politik kolonial Belanda. Surat kabar seperti *Sin Tit Po*, *Sin Po* maupun *Pewartar Soerabaia* menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah kolonial. Sementara surat kabar seperti *Siang Po* dan *Pelita Tionghoa*, sekalipun mendukung pemerintah kolonial sebenarnya tidak lebih sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi bisnisnya untuk mendapat pelanggan sebanyak-banyaknya tanpa harus memusuhi kaum pergerakan.

SIMPULAN

Eksistensi kaum Tionghoa dalam dunia pers di Hindia Belanda dimulai dengan kemunculan Lo Tun Tay sebagai editor surat kabar *Mataharie*. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti kaum Tionghoa mulai menunjukkan perannya dalam dunia pers. Krisis ekonomi yang terjadi menjelang akhir abad kesembilan belas mendorong munculnya embrio industri pers Tionghoa. Akuisisi *Bintang Timoor* oleh Baba Tjoa Tjoan Lok pada tahun 1886 menjadi pionir industri pers Tionghoa yang kemudian diikuti oleh pengusaha Tionghoa lainnya. Eksistensi pers Tionghoa pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perkumpulan-perkumpulan milik kaum Tionghoa seperti *Hok Kian Kong Tik Soe* yang berupaya menyebarkan semangat kemajuan kaum Tionghoa.

Industri pers Tionghoa pada awal abad kedua puluh hingga tahun 1942 berkembang sejalan dengan tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia serta bangkitnya pergerakan nasional Indonesia. Secara historis pers Tionghoa memenuhi fungsinya sebagai media komunikasi massa yang menjembatani dialog informasi dan berbagai pemikiran antara masyarakat Tionghoa Peranakan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Tidak bisa dipungkiri, pers Tionghoa keberadaannya telah berkontribusi terhadap pergerakan nasional rakyat Indonesia sesuai dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Setiap pers Tionghoa peranakan dengan cara dan strateginya masing-masing dengan juga selalu berupaya menjaga eksistensinya dalam memperoleh simpati dari pelanggan. Dengan demikian, eksistensi pers Tionghoa pada masa pergerakan nasional tidak hanya dapat ditinjau dari aspek politik saja, melainkan pula aspek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2003). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Amalia, F., & Artono. (2017). *Pewartar Soerabaia Sebagai Media Komunikasi Nasionalisme Tionghok Masyarakat Tionghoa Tahun 1937 - 1940*. *AVATARA*, 5(1), 1535–1549.
- Fachrurozi, M. H. (2019). *Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra*. *Bihari*, 2(1), 13–25.
- Fachrurozi, M. H., Warto, & Mulyoto. (2017). *The Abdul Rivai's Thought if Nationalism in the Bintang Hindia Newspaper*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 4(6), 72–81.
- Kosasih, A. (2013). *Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900 – 1942*.

- SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 41–60.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maters, M. (2003). *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Sai, S.-M. (2016). Mandarin lessons: modernity, colonialism and Chinese cultural nationalism in the Dutch East Indies, c.1900s. *INTER-ASIA CULTURAL STUDIES*, 17(3), 375–394.
- Surjomihardjo, A. (1980). *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Suryadinata, L. (1971). Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese. *Indonesia*, (11), 83–94.
- Wakhid, A. (1999). Modal Cina Dan Nasionalisme Indonesia: Industri Pers Cina Pada Masa Pergerakan Nasional, 1910-1942. *Lembaran Sejarah*, II(1).